

## **BAB II**

### **RIWAYAT HIDUP RADEN AJENG SUTARTINAH**

#### **2.1 Latar Belakang Keluarga**

Raden Ajeng Sutartinah atau Nyi Hadjar Dewantara merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Ia dilahirkan pada Selasa 14 September 1890, di Yogyakarta. Ia merupakan putri keenam dari pasangan Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Sasraningrat dan Raden Ayu Mudmainnah. Ayah Nyi Hadjar Dewantara, KPH Sasraningrat adalah seorang bangsawan terkemuka di lingkungan Keraton Yogyakarta. Ia merupakan putra dari Kanjeng Pangeran Adipati Arya (KPAA) Paku Alam III, yang menjabat sebagai salah satu penguasa wilayah Paku Alam pada masa itu. Sementara itu, sang ibu, Raden Ayu Mudmainnah, berasal dari keluarga ningrat, yaitu putri dari Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Mertonegoro II. Setelah menikah dengan KPH Sasraningrat, R. Ayu Mudmainnah kemudian dikenal dengan nama B.R. Ayu Sasraningrat.

Sutartinah lahir pada masa yang kurang menguntungkan bagi kehidupannya, karena saat itu kalangan bangsawan Jawa sedang mengalami kemunduran. Kejayaan Kerajaan Mataram Islam telah berakhir, dan wilayahnya telah terbagi menjadi empat kerajaan kecil, yaitu Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Praja Mangkunegaran, dan Praja Paku Alaman. Meskipun sejak selesainya Perang Diponegoro pada tahun 1830 hampir tidak terjadi konflik politik besar di Pulau Jawa, ketegangan antara kaum bangsawan dan pemerintah kolonial Belanda tetap berlangsung secara tersembunyi. Pemerintah kolonial dengan cerdik menggunakan

berbagai taktik untuk memperlemah dan memecah belah kerajaan-kerajaan yang sudah kehilangan kekuatannya. Setiap kali ada raja baru yang naik tahta menggantikan raja yang wafat, Belanda selalu ikut campur dalam urusan internal kerajaan. Mereka memanfaatkan momen ini untuk memaksakan perjanjian-perjanjian baru yang pada dasarnya mengurangi kekuasaan para raja dan semakin memperkuat kedudukan kolonial Belanda.<sup>36</sup>

Jika menengok kembali perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa dari masa lampau, tampak jelas bahwa sejak pengaruh kolonial Belanda mulai merasuk dalam bidang ekonomi dan politik, konflik di kalangan bangsawan menjadi sesuatu yang lazim terjadi. Dalam hampir setiap periode pemerintahan, selalu ada pangeran yang tersingkir, disingkirkan, atau memiliki untuk menjauh demi menghindari beban hidup yang berat yang bisa menimpa keluarganya. Kemewahan yang mereka nikmati seringkali hanya bersifat sementara. Ketika persaingan untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh semakin memuncak, konflik antarbangsawan pun makin meruncing, menjadikan kehidupan mereka pahit dan penuh tekanan, seolah-olah mereka hidup di atas tanah yang membara. Dalam suasana sejarah yang penuh penderitaan dan kesedihan itulah Sutartinah dilahirkan, keadaan tersebut menjadi latar belakang yang membentuk kepribadian serta kesadaran hidupnya secara mendalam.<sup>37</sup>

Ayah Sutartinah, Pangeran Sasraningrat adalah putra dari Sri Paku Alam ke-III dan permaisurinya. Ia sebenarnya berhak menjadi penerus tahta ayahnya,

---

<sup>36</sup> Bambang Sukawati Dewantara, *Nyi Hajar Dewantara*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1979), hlm 13-14.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 15.

terutama karena kakaknya, Pangeran Suryaningrat tidak bisa menjadi penerus karena mengalami kebutaan. Namun, pemerintah kolonial Belanda menolak pencalonan Sasraningrat sebagai Sri Paku Alam ke-IV, dengan berbagai alasan yang tidak sepenuhnya jelas. Karena adanya tekanan kuat dari pihak Belanda, Kanjeng Ratu Sepuh, janda dari Sri Paku Alam I yang sangat dihormati dalam lingkungan keraton akhirnya mengajukan cucu lain sebagai calon pengganti tahta. Sosok ini kemudian langsung disetujui dan disahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Calon yang diangkat tersebut bukanlah anak permaisuri, bahkan bukan keturunan langsung dari Sri Paku Alam ke-III. Ia hanyalah seorang bangsawan yang sudah lama bekerja di bidang pemerintahan dan dianggap berpengalaman. Pemerintah beralasan bahwa kedua putra dari permaisuri dianggap masih terlalu mudah untuk memimpin. Namun, para sejarawan keraton meragukan alasan ini.

Saat masih berkuasa, Sri Paku Alam ke-III dikenal sebagai raja yang memiliki pemikiran kritis terhadap Belanda, dan banyak bukti menunjukkan bahwa pemerintah Kolonial tidak menyukai pandangan politiknya. Ada upaya dari pihak Belanda untuk mencelakainya dengan tipu daya. Alasan lain mengapa Belanda tidak menginginkan keturunan Sri Paku Alam ke-III melanjutkan tahta adalah karena Sri Paku Alam ke-III yang dikenal mampu menjaga hubungan baik antara kerajaannya dengan Kesultanan Yogyakarta melalui pendekatan budaya. Setelah Sri Paku Alam ke-III wafat, Belanda segera mengambil tindakan untuk memutuskan garis keturunannya dari tahta, dengan menyingkirkan Pangeran Suryaningrat dan Pangeran Sasraningrat dari jalur pewarisan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 16-17.

Secara lahiriah, anak-anak Sri Paku Alam ke-II tampaknya tidak mengalami kesulitan. Mereka tetap tinggal di istana dan diperlakukan sebagaimana mestinya sebagai anak seorang raja. Namun, mereka merasakan tekanan yang dalam. Hati mereka mulai gelisah dan lelah karena beban perasaan yang sulit dihindari. Perasaan ini memuncak saat mereka melihat Residen Belanda bebas keluar masuk istana seolah-olah itu rumahnya sendiri. Dari pengalaman itulah, anak-anak Sri Paku Alam ke-III mulai sadar secara batiniah bahwa hal yang lebih penting daripada sekedar tahta adalah kehidupan yang damai, aman, dan tenteram. Keinginan untuk merasakan kebebasan dan ketenangan itu menumbuhkan berbagai angan-angan dalam benak mereka yang kemudian berkembang menjadi cita-cita yang tertanam kuat dalam jiwa. Cita-cita inilah yang akhirnya membangkitkan semangat mereka untuk belajar dari sejarah perjuangan melawan penjajahan Belanda. Walaupun Pangeran Suryaningrat dan saudara-saudaranya masih terlalu muda untuk benar-benar memahami apa itu kolonialisme, pengalaman hidup yang mereka alami membentuk dalam diri mereka suatu sikap dan prinsip cinta pada kebebasan dan kemerdekaan.

Pangeran Suryaningrat mendalami pelajaran agama Islam dari seorang guru agama. Selain itu, ia juga mempelajari ilmu dan seni music Jawa. Dengan bimbingan pamongnya. Ia mempelajari karya sastra Sultan Agung yang membahas agama Islam dalam kaitannya dengan sastra dan seni, melalui sebuah buku berjudul *Sastra Gending*. Pangeran Suryaningrat dikenal sebagai seorang seniman sekaligus pemain music tradisional yang andal. Sedangkan adiknya, Pangeran Sasraningrat lebih tertarik pada bidang sejarah dan sastra Jawa Kuno. Ia juga belajar bahasa

Belanda dan filsafat theosofi secara otodidak. Pada usia 24 tahun, ia menulis artikel di surat kabar berbahasa Jawa dan Belanda dengan menggunakan nama pena Kridasara. Karya-karya terbaiknya ditulis dalam bentuk puisi dan prosa berbahasa Jawa yang diadadikan dalam buku-buku berjudul *Serat Weda Madya*, *Serat Budha Gutama*, *Serat Wulang Ngreni*, dan *Serat Kancil*.<sup>39</sup>

Pangeran Sasraningrat merupakan bangsawan yang menjadi korban dari intrik politik pemerintah Belanda. Upaya Belanda untuk memutus garis keturunan Sri Paku Alam ke-II dengan menyinkirkan kedua putra dari permaisuri, menjadi pengalaman pahit yang memberikan banyak pelajaran bagi Pangeran Sasraningrat. Proses pergantian tahta dari Sri Paku Alam ke-IV hingga Sri Paku Alam Ke-V terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Setelah Sri Paku Alam ke-V wafat, Residen Belanda akhirnya menunjuk Pangeran Sasraningrat sebagai pejabat sementara pengganti dengan gelar “Gusti Wakil”, meskipun saat itu usianya sudah lanjut. Tidak lama setelah ia menyerahkan kembali jabatan tersebut, kesehatannya mulai menurun hingga akhirnya ia terbaring sakit. Pangeran Sasraningrat meninggal dunia dalam keadaan sakit, di hadapan Dr. Wahidin dan keluarga terdekatnya.<sup>40</sup>

Dalam suasana kehidupan yang penuh tekanan politik, ketidakadilan, dan pergolakan batin akibat penjajahan Belanda, di situlah Sutartinah bersama saudara-saudaranya dilahirkan dan dibesarkan. Mereka tumbuh dalam lingkungan istana yang secara lahiriah tampak tenang dan terhormat, namun di balik itu semua,

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 19-20.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 26.

menyimpan luka sejarah dan tekanan psikologis yang mendalam. Sejak kecil, Sutartinah dan saudara-saudaranya harus menerima kenyataan pahit akibat politik licik pemerintah kolonial Belanda yang memutus hak garis keturunan atas tahta. Lingkungan seperti ini tidak hanya membentuk karakter mereka, tetapi juga menempa jiwa dan pemikiran mereka untuk tidak menerima keadaan begitu saja. Perasaan terasing dan diperlakukan tidak adil justru menumbuhkan kesadaran dalam diri mereka tentang pentingnya kebebasan, harga diri, dan perjuangan. Maka, sangatlah wajar apabila dari pengalaman hidup yang pahit, itu tumbuh dalam diri Sutartinah semangat perjuangan dan jiwa merdeka. Jiwa yang tidak sekadar lahir dari pendidikan atau bacaan, tetapi dari pergaulan batin yang nyata, dari keteguhan hati menghadapi kenyataan hidup yang tidak berpihak.

## **2.2 Pendidikan Raden Ajeng Sutartinah**

Raden Ajeng Sutartinah menamatkan *Europease Lagere School* (ELS) pada tahun 1904, lalu melanjutkan ke sekolah guru. Ia kemudian menjadi guru bantu di sekolah yang didirikan R.M. Rio Gondoatmodjo pada tahun 1905. Setelah tiga tahun bekerja sebagai guru, pada 4 November 1907, Sutartinah dipertunangkan dengan R.M. Suwardi Suryaningrat, sesudah pertunangan ini Sutartinah tetap melanjutkan mengajar dan Suwardi melanjutkan studinya di Stovia. Sejak Sutartinah masih bayi, kedua keluarga telah sepakat untuk menjodohkan Sutartinah dengan Suwardi di masa depan. Kesepakatan ini bukan sekedar kesepakatan keluarga, melainkan cerminan dari hubungan erat antara dua garis keturunan bangsawan yang memiliki latar belakang perjuangan dan cita-cita yang sejalan. Pada usia 14 tahun, Sutartinah pernah dengan tegas menolak lamaran dari seorang

pangeran yang merupakan putra mahkota. Keputusan itu ia ambil bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk keteguhan hati untuk memegang hasil kesepakatan keluarga yang telah ditetapkan sejak lama. Sutartinah tetap setia pada pilihan awal keluarganya dan dirinya sendiri, yaitu menjadikan Suwardi Suryaningrat sebagai calon pendamping hidupnya di masa depan.<sup>41</sup>

Perkawinan Sutartinah dengan Suwardi Suryaningrat menjadi titik awal keterlibatannya dalam dunia jurnalistik dan politik yang pada saat itu kerap bersinggungan secara konfrontatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Kecenderungan ini tidak lepas dari faktor psikogenealogis, mengingat keluarga besar Sasraningrat dan Suryaningrat dikenal memiliki semangat perlawanan terhadap kolonialisme. Semangat tersebut mengakar kuat karena mereka merupakan keturunan tokoh-tokoh pergerakan seperti Nyi Ageng Serang dan Pangeran Diponegoro. Konsekuensi dari sikap perlawanan ini terlihat nyata ketika Sutartinah, Suwardi, dan anggota keluarga lainnya pernah dilarang untuk mengenyam pendidikan di sekolah milik pemerintah kolonial oleh residen Yogyakarta.<sup>42</sup>

Pada Agustus 1913, Sutartinah resmi menikah dengan Suwardi Suryaningrat melalui prosesi ijab qabul, meskipun saat itu Suwardi tengah berada dalam status tahanan. Ia sedang menanti keberangkatan ke negeri Belanda sebagai bentuk hukuman pengasingan, akibat tulisan kritisnya yang dimuat oleh *Komite Boemi Poetera* berjudul *Als ik een Nederlander Was* (Andaikan Aku Seorang Belanda).

---

<sup>41</sup> Bambang Sukawati Dewantara, *Nyi Hajar Dewantara*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1979), hlm 54.

<sup>42</sup> Suratmin, dkk, *Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), hlm 74.

Artikel tersebut diterbitkan di bawah tanggung jawab Tjipto Mangunkusumo dan dicetak oleh percetakan *De Eerste Bandoengsche Publicatie Maatschappij*, yang saat itu dipimpin oleh J.F. Wesselius.<sup>43</sup> Sutartinah selalu memberi dorongan dan semangat kepada Suwardi bahkan membantunya dalam setiap kesulitan yang dihadapi.

Pada tanggal 30 Juli 1913, Suwardi Suryaningrat ditangkap oleh pihak kepolisian di kediamannya dan segera dijebloskan ke dalam tahanan. Selama masa penahanan, rumahnya dijaga secara ketat oleh aparat, dan tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk masuk. Berdasarkan keputusan *Raad van Justitie*, Suwardi diperintahkan untuk segera meninggalkan Bandung guna menjalani masa pengasingan di Pulau Bangka. Sementara itu, dua rekannya, Tjipto Mangunkusumo dan E.F.E. Douwes Dekker, masing-masing dijatuhi pembuangan ke Banda dan Kupang.<sup>44</sup> Dalam upaya pembelaan terhadap keputusan pembuangan, ketiga tokoh Suwardi Suryaningrat, Tjipto Mangunkusumo, dan E.F.E. Douwes Dekker mengajukan permintaan agar tidak diasingkan ke wilayah-wilayah yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai gantinya, mereka mengusulkan agar diperbolehkan menjalani masa pengasingan di negeri Belanda. Permintaan tersebut akhirnya dikabulkan oleh pemerintah kolonial, dengan ketentuan bahwa mereka harus diberangkatkan paling lambat 30 hari setelah keputusan disahkan. Tepat pada 6 September 1913, ketiganya bersama istri dan anak-anak mereka berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok, Batavia, menuju Belanda melalui Singapura untuk

---

<sup>43</sup> Irna H.N. Hadi Soewito, *Soewardi Soerjaningrat dalam Pengasingan*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm 27.

<sup>44</sup> Di kutip dari Djoko Marihandono, "Het Verbaningsbesluit" dalam *Het Nieuws van den Dag Voor Nederlandsch Indie*. 29 Agustus 1913, lembar ke-2.



menjalani masa pengasingan.<sup>45</sup> Namun, keberangkatan mereka sempat mengalami penundaan, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa batas waktu yang telah ditentukan untuk menuju tempat pengasingan akan terlampaui. Pada akhirnya, pada 13 September 1913, Sutartinah turut mendampingi Suwardi Suryaningrat berlayar dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju tanah pengasingan.<sup>46</sup> Kehadiran Sutartinah turut memberikan warna baru dalam aktivitas perjuangan ketiga tokoh “Tiga Serangkai”: Suwardi Suryaningrat, dr. Tjipto Mangunkusumo, dan E.F.E. Douwes Dekker. Peran serta kiprah Sutartinah selama berada di Belanda mencerminkan bahwa dirinya bukan sekadar pendamping hidup Suwardi, melainkan sosok pejuang yang memiliki kesadaran politik dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Ia tidak menjalani perannya sebagai istri yang pasif, melainkan tampil aktif, berdiri sejajar, dan turut serta dalam perjuangan yang dijalankan suaminya.

Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, Sutartinah menolak untuk tunduk pada nilai-nilai feodal yang terwujud dalam pepatah Jawa “swarga nunut, neraka katut”, yang mencerminkan ketundukan mutlak istri terhadap nasib suami. Sebaliknya, ia lebih memegang teguh nilai-nilai kesetaraan dan kebersamaan dalam rumah tangga dan perjuangan, sebagaimana termuat dalam pepatah “seia sekata, sehidup semati” dan “ringan sama dijinjing, berat sama dipikul”. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi landasan bagi Sutartinah dalam menjalani perannya sebagai istri sekaligus mitra perjuangan yang tangguh dan setara.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> HAH Harahap dan B.S. Dewantara. *Ki Hajar Dewantara Dkk*, (Jakarta: PT: Gunung Agung, 1980), hlm 148.

<sup>46</sup> Djoko Marihandono, *Ki Hajar Dewantara, Pemikiran dan Perjuangannya*, (Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional, 2017), hlm 53.

<sup>47</sup> Bambang Sukawati Dewantara, *Nyi Hajar Dewantara*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1979), hlm 72.

Setibanya di Belanda, Sutartinah bersama Suwardi Suryaningrat dan dua tokoh Tiga Serangkai lainnya menempati sebuah apartemen sederhana yang mereka sewa bersama. Tempat tinggal tersebut berada di lantai paling atas atau loteng sebuah bangunan, yang merupakan pilihan dengan biaya sewa paling rendah. Keputusan untuk menempati hunian tersebut bukan semata karena keterbatasan finansial, melainkan merupakan bentuk kesadaran dan komitmen kolektif untuk menjalani kehidupan hemat dan bertanggung jawab atas setiap pengeluaran. Kehidupan mereka selama di pengasingan didukung oleh bantuan keuangan dari rekan-rekan seperjuangan yang tergabung dalam suatu badan penggalangan dana bernama *Tot Aan De Onafhankelijkheid* (TADO), yang secara khusus dibentuk untuk menopang kebutuhan hidup para tokoh yang dibuang ke luar negeri. Melalui lembaga ini, Suwardi dan Sutartinah memperoleh tunjangan hidup sebesar f150 per bulan. Namun, jumlah tersebut tentu tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan harian mereka, sehingga mereka harus mengelola keuangan dengan sangat hati-hati dan efisien.<sup>48</sup> Untuk menambah anggaran rumah tangga para buangan politik itu, Sutartinah bekerja sebagai guru di sebuah *Frobel School* (Taman Kanak-kanak) di Weimaar Den Haag.<sup>49</sup>

Pada masa itu, Eropa mulai memasuki masa krisis yang memuncak pada pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914. Kondisi tersebut menyebabkan kemerosotan ekonomi yang signifikan dan berdampak langsung terhadap kehidupan Sutartinah serta para anggota Tiga Serangkai yang berstatus sebagai

---

<sup>48</sup> Djoko Marihandoko, *op. cit.* hlm 54.

<sup>49</sup> Bambang Sukawati Dewantara, *op. cit.* hlm 73.

tokoh buangan politik. Situasi tersebut memunculkan kesulitan hidup yang berat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam menghadapi tekanan tersebut, Sutartinah pernah menerima tawaran bantuan yang menggiurkan dari Mr. Abendanon, mantan Kepala Urusan Pendidikan di Hindia Belanda, sebagai upaya untuk meringankan beban hidup mereka. Namun, dengan keteguhan prinsip dan komitmen terhadap idealisme perjuangan, Sutartinah menolak tawaran tersebut. Ia menyadari bahwa untuk menjaga kemurnian cita-cita kemerdekaan, ia harus mampu hidup mandiri, sederhana, dan bebas dari pengaruh pihak mana pun. Sikap konsistennya itu justru menimbulkan rasa hormat dari sebagian kalangan masyarakat Belanda, yang melihat keteguhan prinsipnya sebagai bentuk integritas moral dan keberanian seorang pejuang perempuan.<sup>50</sup>

Pada tahun 1918, terjadi perdebatan sengit di dalam Tweede Kamer (Dewan Perwakilan Rakyat Belanda) mengenai kebijakan pembuangan terhadap kelompok Tiga Serangkai. Perdebatan ini mencerminkan adanya perbedaan pandangan yang tajam di antara fraksi-fraksi politik di parlemen Belanda. Kelompok kolonialis, meskipun berada dalam posisi minoritas, menyuarakan pembelaan terhadap kebijakan represif pemerintah kolonial Hindia Belanda, termasuk pembuangan tokoh-tokoh pergerakan nasional tersebut. Sementara itu, golongan demokrat, sosialis, serta kelompok-kelompok progresif lainnya secara tegas mengkritik dan mengecam kebijakan tersebut sebagai tindakan yang melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Ketika dilakukan pemungutan suara, mayoritas anggota parlemen menyatakan penolakannya terhadap kebijakan pembuangan tersebut,

---

<sup>50</sup> Suratmin dkk, *op. cit.* hlm 75.

menandakan kemenangan bagi golongan yang mendukung nilai-nilai demokratis dan keadilan.<sup>51</sup>

Setelah Douwes Dekker melanjutkan pendidikannya di Jerman, situasi perjuangan di luar negeri mengalami perubahan. Pada Juli 1914, dr Tjipto Mangunkusumo diizinkan kembali ke tanah air karena penyakit asmanya yang semakin parah dan akhirnya menetap di Solo. Dengan kembalinya dr. Tjipto, maka tanggung jawan melanjutkan perjuangan di Nederland jatuh kepada Suwardi dan Sutartinah. Sejak saat itu, Sutartinah pun harus menghentikan kegiatan mengajarnya karena seluruh tenaganya dibutuhkan untuk mendukung perjuangan. Peran Sutartinah semakin besar setelah ia dan Suwardi mendirikan Indonesische Pers Bureau, sebuah biro pers yang bertugas menyampaikan berbagai informasi dan berita dari Hindia Bealnda ke surat kabar di Negeri Belanda. Melalui biro ini, mereka berupaya membuka mata masyarakat Eropa terhadap situasi sosial-politik yang terjadi di tanah air. Selain itu, Indonesische Pers Bureau juga menerbitkan brosur, artikel, dan tulisan yang membahas organisasi-organisasi penting seperti Budi Oetomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij. Selama lima tahun penuh, Sutartinah menjadi rekan seperjuangan yang setia bagi Suwardi. Dalam kegiatan jurnalistik, ia terlibat langsung, antara lain dengan membantu mengumpulkan dan menyusun artikel, serta menggunting berita-berita penting dari berbagai surat kabar.

52

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 75

<sup>52</sup> Bambang Sukawati Dewantara, *op. cit.* hlm 91-92.

Melalui upaya yang konsisten dan berani, Sutartinah bersama Suwardi Suryaningrat berhasil membuka mata dan kesadaran masyarakat Belanda mengenai realitas yang terjadi di Hindia Belanda serta perjuangan rakyat pribumi yang tertindas. Kehadiran mereka, disertai dengan aktivitas politik dan intelektual yang kritis, turut memengaruhi opini publik dan memperkuat dukungan dari kalangan demokrat dan kelompok progresif di Belanda. Golongan ini secara tegas mengecam kebijakan represif yang diterapkan oleh pemerintah kolonial terhadap tokoh-tokoh pergerakan nasional. Sebagai konsekuensi dari meningkatnya tekanan politik dan kemenangan golongan progresif di parlemen Belanda, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Graaf van Limburg Stirum, akhirnya mengeluarkan keputusan untuk membebaskan dr. Tjipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, dan dr. E.F.E. Douwes Dekker dari status sebagai orang buangan. Keputusan tersebut disambut dengan antusias oleh kalangan pergerakan nasional, termasuk oleh Sutartinah sendiri, yang selama ini memainkan peran penting dalam perjuangan bersama melawan kolonialisme.

Sutartinah dan Suwardi tiba di Jakarta (Batavia) pada 15 September 1919 dengan menaiki kapal Rinjani selama 51 hari.<sup>53</sup> Melihat perkembangan politik yang terjadi pada masa itu, ketiga tokoh yang dikenal sebagai "Tiga Serangkai" menyadari bahwa tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan kebersamaan dalam satu wadah perjuangan. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk membubarkan *Indische Partij*. Pada periode ini, muncul berbagai tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, antara lain berdirinya *Taman Siswa*, lahirnya *Sumpah*

---

<sup>53</sup> *Ibid*, 57.

*Pemuda*, pendirian *Partai Nasional Indonesia (PNI)*, dan diselenggarakannya *Kongres Perempuan Indonesia* yang pertama, serta berbagai peristiwa penting lainnya. Dalam konteks perjuangan yang baru, Sutartinah turut serta mendampingi Suwardi Suryaningrat dalam mendirikan dan mengembangkan *Taman Siswa*. Pada tanggal 3 Juli 1922, Suwardi memimpin lembaga pendidikan tersebut, sedangkan Sutartinah mengambil peran penting dalam pembinaan perempuan melalui pendirian organisasi "Wanita Taman Siswa", di mana ia menjabat sebagai ketua sekaligus anggota Badan Penasihat Pemimpin Umum. Selain aktif dalam organisasi perempuan, Sutartinah juga berperan dalam pengembangan jenjang pendidikan awal seperti *Taman Indria* (setara dengan taman kanak-kanak) dan *Taman Muda* (setara dengan sekolah dasar) di lingkungan Perguruan Taman Siswa.

Kegiatan organisasi *Wanita Taman Siswa* semakin mengalami perkembangan yang signifikan. Dalam kapasitasnya sebagai ketua, Sutartinah aktif menulis berbagai artikel bertema kewanitaan yang dipublikasikan di sejumlah surat kabar nasional, serta turut menyampaikan siaran melalui radio untuk menyuarakan isu-isu perempuan. Upaya ini mencerminkan komitmen Sutartinah dalam memperluas wawasan dan kesadaran kaum perempuan Indonesia. Selain itu, dalam rangka memperkuat gerakan perempuan secara nasional, Sutartinah menjalin kerja sama dengan tokoh-tokoh perempuan lain yang memiliki visi serupa, yakni menyatukan berbagai organisasi perempuan Indonesia dalam satu wadah perjuangan yang lebih terorganisir dan kolektif.